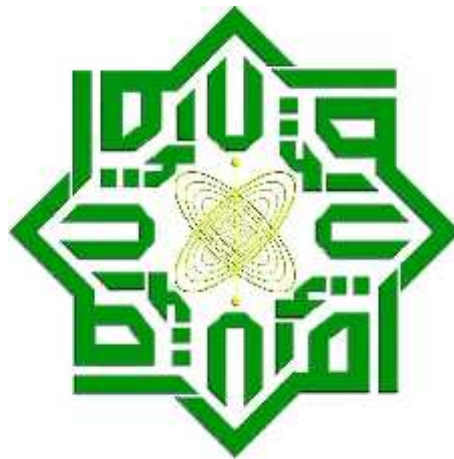


**ANALISIS YURIDIS TENTANG SENGKETA PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA ALAT BERAT DALAM PERKARA
NOMOR 108/PDT/G/2011/PN.PBR**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH
FITRAH HANIF
10927007494**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Pada tanggal 19 November 2010, penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan dan sekaligus penandatanganan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, antara PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi dengan PT.Cahaya Bara Muliayang berlaku selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 18 November 2011.

Pada tanggal 23 Juli 2011, penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan materi pokok wanprestasi dengan Nomor: 325/SK/2011/PN.PBR. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah menggunakan alat berat di lokasi pertambangan tanpa izin dan keterlambatan uang sewa. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) dengan amar putusan yaitu menerima eksepsi tergugat, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, dan menghukum penggugat untuk membayar perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, bagaimana analisis yuridis, pertimbangan majelis hakim, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam perkara nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap pembuktian, pertimbangan hakim dan akibat hukum dari putusan Perkara Nomor 108/Pdt.G/ 2011/PN.Pbr.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menerangkan dan menggambarkan data yang diperoleh melalui pengkajian kasus Nomor 108/Pdt.G/2011/PN.Pbr, yang berkenaan dengan analisis yuridis, pertimbangan majelis hakim, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr yang menegaskan bahwa gugatan penggugat dengan materi pokok wanprestasi adalah prematur, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*). Maka, upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah dengan mengajukan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru tersebut tidaklah melekat unsur *ne bis in idem*, dengan ketentuan faktor prematur tidak ada lagi dalam gugatan baru tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teadan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakulas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam penulisan Skripsi ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk keluarga penulis, yaitu ayahanda Abdul Hakim dan ibunda Misyati. Jasa ayahanda dan ibunda tidak bisa penulis lupakan dan tidak bisa terbalas oleh penulis. Karena materi tidak akan bisa membalas semua pengorbanan ayahanda dan ibunda;
2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. HM. Nazir, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA Riau;
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian Skripsi ini;

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H., dan Sekretaris Jurusan, Bapak Maghfirah M.Ag, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak H. Azwar Aziz S.H., M.Si., yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini;
6. Kepada Bapak Firdaus S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang selalu memberikan masukan dan motivasi kepada Penulis hingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan;
8. Terima kasih untuk teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2009 khususnya konsentrasi Hukum Bisnis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu telah membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
9. Buat Saudara Kandung Penulis, kanda Sulastina, kanda Siti Hafisah, dinda Fitri Hasanah, serta dinda Farhan Wahyudi alias Johan yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa dan motivasi, serta inspirasi kepada Penulis hingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
10. Buat Siti Umayatul Amanah S.Ikom yang selalu setia menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang, serta do'a dan motivasi selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini; dan

11. Buat semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan Penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2013
Penulis

FITRAH HANIF
10927007494

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : GAMBARAN UMUM

A. Kronologi Perkara	13
B. Gambaran Umum Perkara.....	18

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

A. Perjanjian.....	25
B. Wanprestasi	30

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Sengketa dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr	37
--	----

B. Pertimbangan Majelis Hakim.....	54
C. Upaya Hukum Bagi Penggugat dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia bisa saja melakukan perbuatan, baik secara perorangan maupun berkelompok. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan individu, dan dapat pula perbuatan tersebut berupa perbuatan yang berhubungan dengan orang lain, di antaranya adalah hubungan dalam lapangan keperdataan, yakni berupa perjanjian atau adanya kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu (a) memberikan sesuatu, (b) berbuat sesuatu, (c) tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya dalam Pasal 1235 ayat (1) KUH Perdata, pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah, perjanjian gadai, hutang-piutang dan sebagainya.¹

Dalam hal perjanjian memberikan sesuatu, maka masing-masing pihak harus menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban atas sesuatu benda yang diterimanya. Hak dan kewajiban tersebut harus seimbang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), h.202

Sebagaimana halnya dengan perjanjian sewa-menyewa, bahwa si pemilik benda harus menyerahkan bendanya kepada pihak penyewa, dan pihak penyewa harus menyerahkan sejumlah uang sewa yang telah disepakati. Adapun benda atau harta yang disewakan tersebut dapat berupa benda tetap dan benda bergerak, seperti rumah, tanah, kendaraan dan sebagainya.

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, pada pokoknya perjanjian sewa-menyewa adalah pihak yang menyewakan wajib menyediakan barang bagi pihak penyewa untuk dapat dinikmati kegunaannya oleh penyewa, dan penyewa membayar imbalan jasa kepada pihak yang menyewakan.²

Sehubungan dengan perjanjian sewa-menyewa antara kedua belah pihak, maka pihak penyewa harus dapat menjaga barang yang disewanya, kemudian pemilik sewa harus menyerahkan bendanya dalam keadaan baik dan dapat dinikmati oleh pihak penyewa. Oleh karena itu masing-masing pihak harus dapat memberikan apa yang menjadi kewajiban masing-masing.

Dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak jarang terjadi penyalahgunaan atau penggunaan benda yang disewa tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu tidak jarang terjadi persengketaan dalam hal perjanjian sewa-menyewa, sebagaimana yang telah terjadi pada kasus berikut ini.

² Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h.16. Lihat pula R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h.340

Penggugat adalah PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Duta Persada Blok D-8 Pekanbaru, yang bergerak di bidang usaha penyewaan alat berat, mengajukan gugatan kepada PT. Cahaya Bara Mulia yang beralamat di Jalan Rokan No. 28B Pekanbaru, selaku penyewa alat berat milik penggugat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pada tanggal 19 November 2010, penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan dan sekaligus penandatanganan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, antara PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi yang diwakili oleh Sapta Afrianta dalam kapasitas jabatannya sebagai Direktur dengan PT.Cahaya Bara Mulia yang diwakili oleh Agusli sebagai Direktur Utama, dengan saksi pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut adalah Mastari dan Syahrums, dengan objek sewa menyewa adalah 1 (satu) unit excavator merk Komatsu Hydraulic Excavator, PC300SE-87 warna kuning, yang berlaku selama 1 tahun hingga tanggal 18 November 2011.

Dalam perjanjian disebutkan, bahwa pihak kedua (tergugat) menjamin sepenuhnya keamanan alat berat sewa yang disewa dari pihak pertama (penggugat) disimpan ditempat dan atau garasi yang layak dan aman. Kemudian pihak kedua (tergugat) menjamin bahwa alat yang disewa tidak digunakan untuk *illegal logging* (penebangan kayu tanpa izin) dan/atau *illegal mining* (penambangan tanpa izin).³

³ Berkas Perkara No.108/Pdt/G/2011/PN.Pbr

Pada tanggal 18 Maret 2011, disaat perjanjian baru berjalan 3 bulan dari seharusnya 12 bulan (1 tahun), penggugat menerima kiriman faksimili dari tergugat berupa surat Nomor 002/CBM/III/2011, dengan perihal pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat tertanggal 18 Februari 2011, yang ditanda tangani oleh tuan Agusli selaku Direktur PT.Cahaya Bara Mulia (tergugat). Penggugat tidak terima dengan hal tersebut dan mengirim surat balasan, yaitu tanggal 18 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat secara mendadak dan tiba-tiba bertentangan dengan kesepakatan awal, dimana sewa alat berat tersebut adalah selama 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2011, penggugat mendapat informasi bahwa excavator (alat berat) yang menjadi objek perjanjian telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*). Dengan kejadian ini maka tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang telah menggunakan alat berat yang menjadi objek perjanjian untuk kegiatan *illegal mining* (penambangan tanpa izin).⁴

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵ Dalam hal tidak dipenuhi suatu perjanjian, maka telah dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

⁴ *Ibid.*

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h. 146

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶

Adapun kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Dalam perjanjian sewa menyewa tersebut di atas kepada tergugat diwajibkan melakukan pembayaran uang sewa Rp.93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, yang mana pembayaran yang dilakukan oleh tergugat hanya lancar hingga pada bulan Februari 2011, dan sesudahnya tergugat belum melakukan pembayaran selama 5 bulan, yakni mulai bulan Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, dan tergugat wajib melakukan pembayaran uang sewa sebesar Rp.468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁷

Oleh karena objek sewa menyewa (excavator) adalah masih dalam status perjanjian sewa guna usaha antara penggugat dengan pihak lain, maka penggugat menderita kerugian, karena harus membayar denda keterlambatan sebesar 9% dari

⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

⁷ Berkas Perkara No.108/Pdt/G/2011/PN.Pbr

angsuran yang telah jatuh tempo yaitu sebesar Rp.5.477.940,- (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya, sehingga adalah pantas jika tergugat juga diberikan kewajiban untuk membayar denda tersebut.

Selanjutnya penggugat juga menderita kerugian karena tidak lagi menerima pembayaran uang sewa alat berat, dan penggugat tidak bisa menguasai kembali alat berat yang menjadi objek perjanjian karena saat ini telah menjadi barang bukti perkara dengan nilai alat berat sebesar Rp.2.504.526.840,- (dua milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Selanjutnya penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dalam pengurusan perkara ini yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Penggugat juga mengalami kerugian immaterial karena mengalami tekanan jiwa karena harus membayar cicilan objek perkara, penggugat juga tidak bisa bekerja secara maksimal karena harus mengurus permasalahan ini, yang akibatnya penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).⁸

Dalam Pasal 1247 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal yang tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”

⁸ *Ibid.*

Selanjutnya dalam Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.”⁹

Dari kasus di atas, penggugat beranggapan bahwa sudah sepantasnya tergugat melakukan pembayaran sejumlah uang dari kerugian yang dialami oleh penggugat, namun dalam kenyataannya Majelis Hakim dalam putusannya tidak mengabulkan gugatan penggugat, sebagaimana amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).¹⁰

Sesuai dengan asas hukum acara perdata yang menyatakan, bahwa majelis hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alasan dan bukti-bukti yang ada pada kedua belah pihak.

Dari kenyataan ini penulis ingin lebih dalam lagi mengkaji permasalahan yang ada dalam perkara ini. Oleh karena perkaranya *N.O. (Niet Ontvankelijke verklard)*, maka penggugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah oleh majelis hakim. Maka

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), h.48. Lihat Pula R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandya Paramita, 1985), h.293

¹⁰ *Opcit*

penulis ingin mengkaji lagi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak menerima gugatan penggugat, dengan mengambil judul penelitian: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA ALAT BERAT DALAM PERKARA NOMOR 108/PDT/G/2011/PN.PBR”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada pembahasan bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr, pertimbangan majelis hakim, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan penggugat dalam Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi penggugat dan tergugat terhadap Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum mengenai perjanjian dan wanprestasi, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak agar dalam melakukan kegiatan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Sedangkan kegunaan secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha atau bisnis, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang berhubungan dengan pelaku bisnis atau dunia usaha.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap analisis yuridis terhadap sengketa yang terjadi pada Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr, pertimbangan majelis hakim, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menerangkan dan menggambarkan data yang diperoleh melalui pengkajian kasus Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr, yang berkenaan dengan analisis yuridis, pertimbangan majelis hakim, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat dalam Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yakni yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini yaitu berupa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli mengenai Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

4. Analisis Data

Analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.¹²

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan dianalisa berdasarkan metode

¹¹ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 97.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 225.

kualitatif, yaitu dengan menentukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi sistematis penulisan dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisi tentang Gambaran Umum, yang terdiri dari Kronologis Perkara, Gambaran Umum Perkara.

BAB III : Berisi Tinjauan Teoritis, yakni Pengertian Perjanjian dan Pengertian Wanprestasi.

BAB IV : Berisi Pembahasan dan Hasil Penelitian yang terdiri atas, Analisis Yuridis, Pertimbangan Majelis Hakim, serta Upaya Hukum yang dapat dilakukan Penggugat dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

BAB V : Merupakan bab Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Kronologi Perkara

Pada tanggal 19 November 2010, penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan dan sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 antara PT. Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat).

Sengketa berawal dari pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan tergugat kepada penggugat ketika perjanjian baru berjalan selama tiga bulan. Pada tanggal 18 Maret 2011 tergugat mengirim faksimili berupa surat nomor 002/CBM/III/2011, tertanggal 18 Februari 2011, dengan perihal pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat yang ditanda tangani oleh tuan Agusli selaku Direktur PT. Cahaya Bara Mulia.

Penggugat merasa dirugikan dan tidak terima dengan adanya surat nomor : 002/CBM/III/2011, dengan perihal pengakhiran perjanjian sewa menyewa tersebut, maka Penggugat pada hari itu juga mengirim surat balasan, yaitu pada tanggal 18 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat secara mendadak dan tiba-tiba adalah

bertentangan dengan kesepakatan awal, dimana sewa alat berat adalah selama 1 tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2011, Penggugat mendapat informasi bahwa alat berat (excavator) yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*). Hal tersebut dibuktikan dengan kopian surat tanda penerimaan barang bukti no. Pol : SP.Sita/06.a/III/2011/Dit Reskrimsus, tertanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Salpandri selaku Penyidik.

Pembayaran uang sewa oleh tergugat hanya lancar hingga tanggal 22 Februari 2011, sedangkan setelahnya tergugat belum melakukan pembayaran uang sewa selama 5 bulan, mulai bulan Maret hingga gugatan ini diajukan. Hingga menimbulkan kewajiban membayar uang sewa sebesar Rp. 468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikarenakan tidak lancarnya pembayaran uang sewa oleh tergugat, sementara alat berat yang menjadi objek sewa menyewa adalah masih dalam status perjanjian sewa guna usaha penggugat dengan pihak lain, maka penggugat menderita kerugian harus membayar denda keterlambatan sebesar 9% dari angsuran yang telah jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 5.477.940,- (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap bulan keterlambatan.

Untuk meminta kejelasan pelaksanaan dan pertanggung jawaban tergugat, pada tanggal 29 Maret 2011 penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat dengan nomor : 32/IHP/III/2011, dengan perihal permintaan informasi, tertanggal 28 Maret 2011 yang telah diterima langsung oleh staf tergugat di kantor tergugat yang baru di jalan Sungai Rokan nomor : 28 B.

Pada tanggal 18 April 2011, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat nomor : 042/IHP/IV/2011, dengan hal somasi/peringatan, tertanggal 15 April 2011. Dikarenakan belum ada kepastian penyelesaian permasalahan, maka pada tanggal 30 Juni 2011 penggugat mengirim surat nomor 061/IHP/VI/2011, dengan hal somasi/peringatan terakhir tertanggal 21 Juni 2011.

Penggugat dalam hal ini sudah berulang kali melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik untuk meminta pertanggung jawaban tergugat, baik dengan bertemu langsung maupun berkomunikasi dengan telpon genggam (HP) maupun pesan pendek (SMS). Namun hingga gugatan diajukan, tergugat tidak menanggapi dengan baik dengan hanya memberi janji-janji, bahkan berusaha mengelak dari tanggung jawab. Karena pada tanggal 3 Juli 2011, kuasa hukum tergugat telah menerima surat nomor : 001/CBM/VI/2011, dengan perihal menanggapi surat dari bapak yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala macam pengurusan PT.CBM ditangani oleh Kusnadi Setio, yang sebelum surat ini diterima tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai pengalihan ini.

Sengketa yang terjadi antara PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi, yang bergerak di bidang bisnis alat berat, dengan PT. Cahaya Bara Mulia sebagai penyewa alat berat. Dimana dalam perjanjian yang telah dilakukan kedua belah pihak sudah ditetapkan bahwa pihak penyewa alat berat (PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi) menyewakan alat berat excavator kepada PT.Cahaya Bara Mulia, yang menyatakan bahwa:

1. Pihak kedua (PT.Cahaya Bara Mulia/Tergugat) menjamin sepenuhnya keamanan alat berat sewa yang disewa dari pihak pertama (PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi/Penggugat) disimpan di tempat dan/atau garasi yang layak dan aman.
2. Pihak kedua (tergugat) menjamin bahwa alat yang disewa tidak digunakan untuk *illegal logging* dan/atau *illegal mining*.

Namun dalam kenyataannya tergugat (PT. Cahaya Bara Mulia) tidak dapat melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, antara lain sebagai berikut:

1. Memutuskan perjanjian secara sepihak.
2. Menggunakan alat berat yang disewa untuk *illegal mining* (penambangan tanpa izin).
3. Keterlambatan membayar uang sewa.

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan-alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

Disamping itu tergugat juga tidak ada menemui penggugat untuk melakukan musyawarah atau mufakat tentang kelanjutan dari perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut. Tergugat menentukannya secara pribadi dan tanpa persetujuan dari pihak penggugat. Di sini tentunya pihak penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan dari tergugat tersebut.

Hal ini dibuktikan dari surat yang dikirim oleh tergugat pada tanggal 18 Maret 2011 yang berisi bahwa tergugat mengakhiri perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut secara sepihak.

Untuk menanggapi surat yang dikirim tergugat tersebut, penggugat sebenarnya sudah mengirim surat balasan kepada tergugat untuk meminta penjelasan tentang perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari pihak tergugat. Tentunya penggugat merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh tergugat tersebut.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat sengketa yang terjadi antara lain adalah kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil antara lain:

1. Kerugian berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu yang tidak lagi bisa dikuasai kembali dengan nilai Rp. 2.504.526.840,- (dua milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
2. Uang sewa yang belum dibayarkan sebanyak lima bulan yaitu Rp. 468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Denda keterlambatan sebesar 9% dari angsuran yang telah jatuh tempo yaitu Rp.5.477.940,- (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
4. Biaya transportasi dan komunikasi yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk melakukan pengurusan sehubungan dengan perkara ini sebelum gugatan ini diajukan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Sedangkan kerugian immateriil yaitu:

Bahwa dikarenakan nama baik penggugat rusak, selain itu penggugat mengalami tekanan jiwa dikarenakan rusaknya keuangan penggugat yang tetap harus membayar cicilan objek perkara *aquo*, dan penggugat tidak bisa bekerja dengan maksimal akibat harus mengurus permasalahan ini yang apabila dinilai adalah berjumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

B. Gambaran Umum Perkara

Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyewaan alat berat kepada pihak-pihak yang hendak menyewa, antara lain berupa alat-alat excavator.

Pada tanggal 19 November 2010, penggugat dan tergugat telah melakukan kesepakatan dan sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, tertanggal 19 November 2010 antara

PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat), yang berkedudukan di Pekanbaru berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Duta Persada Blok D-8 Pekanbaru, yang diwakili oleh Sapta Afrianta selaku Direktur, dengan PT. Cahaya Bara Mulia (tergugat) yang beralamat di Jalan Rokan No.80 H Pekanbaru yang diwakili oleh Agus Li sebagai Direktur Utama, dengan saksi pada saat penandatanganan perjanjian adalah Mastari dan Syahrums. Dengan objek sewa menyewa adalah 1 (satu) unit excavator Merk Komatsu Hydraulic Excavator PC300SE-87 warna kuning, yang berlaku selama 1 tahun hingga tanggal 18 November 2011 (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian), yang sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat.¹³

Perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut telah mengatur klausula-klausula tentang pelaksanaan perjanjian sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, yang klausula-klausula tersebut, antara lain Pasal 2 ayat (28) Perjanjian Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010 disebutkan bahwa “Pihak kedua (tergugat) menjamin sepenuhnya keamanan alat berat yang disewa dari pihak pertama (penggugat) disimpan di tempat dan/atau garasi yang layak dan aman”. Kemudian Pasal 28 ayat (32) menyebutkan: “Pihak kedua (tergugat) menjamin bahwa alat yang disewa tidak digunakan untuk *illegal logging* dan/atau *illegal mining*”.

Pada tanggal 18 Maret 2011, pada saat perjanjian baru berjalan 3 (tiga) bulan yang seharusnya 12 bulan (1 tahun), penggugat menerima kiriman faksimili dari tergugat berupa surat dengan Nomor 002/CBM/III/2011, dengan perihal pengakhiran

¹³ Berkas Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr.

perjanjian sewa menyewa alat berat tertanggal 18 Februari 2011, yang ditanda tangani oleh tuan Agusli selaku Direktur PT. Cahaya Bara Mulia (tergugat).

Penggugat merasa dirugikan dan tidak terima dengan adanya surat tersebut, maka penggugat pada hari yang sama kemudian telah mengirimkan surat balasan yaitu tanggal 18 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat secara mendadak dan tiba-tiba, yang bertentangan dengan kesepakatan awal dimana sewa alat berat adalah selama 1 (satu) tahun.

Pada tanggal 22 Maret 2011, penggugat mendapat informasi excavator (alat berat) yang menjadi objek perjanjian tersebut telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*), sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), berupa kopian surat tanda penerimaan barang bukti No.Pol. SP.Sita/06.a/III/2011/Dit Reskrimsus, tertanggal 19 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Polisi Salpandri selaku penyidik.¹⁴

Perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut telah membebankan kewajiban bagi tergugat untuk melakukan pembayaran uang sewa Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Pembayaran yang dilakukan tergugat hanya lancar sampai bulan Februari 2011 yaitu pada tanggal

¹⁴ *Ibid.*

22 Februari 2011, dan sesudahnya tergugat belum melakukan pembayaran selama 5 (lima) bulan, mulai bulan Maret 2011 hingga gugatan ini diajukan, sehingga menimbulkan kewajiban pembayaran uang sewa Rp.468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena tidak lancarnya pembayaran uang sewa oleh tergugat, sementara alat berat yang menjadi objek sewa menyewa adalah masih dalam status perjanjian sewa guna usaha penggugat dengan pihak lain, maka penggugat menderita kerugian harus membayar denda keterlambatan sebesar 9% dari angsuran yang telah jatuh tempo yaitu Rp.5.477.940,- (lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setiap bulan keterlambatan.

Untuk meminta kejelasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban tergugat, pada tanggal 29 Maret 2011 penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat Nomor 032/IHP/III/2011, dengan hal permintaan informasi tertanggal 28 Maret 2011 yang telah diterima langsung oleh staf tergugat di kantornya di Jalan Sungai Rokan Nomor 28 B. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2011, penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat Nomor 042/IHP/IV/2011, dengan hal somasi/peringatan tertanggal 15 April 2011, yang telah diterima langsung oleh staf tergugat di Kantor Tergugat di Jalan Sungai Rokan Nomor 28 B. Kemudian somasi

terakhir melalui kuasa hukumnya penggugat mengirimkan surat dengan Nomor 061/IHP/VI/ 2011 tertanggal 21 Juni 2011.¹⁵

Penggugat telah berulang kali melakukan upaya penyelesaian secara baik-baik untuk meminta pertanggungjawaban tergugat, baik dengan bertemu langsung maupun berkomunikasi dengan telepon genggam (HP) maupun pesan pendek (SMS) namun hingga gugatan ini diajukan, tergugat tidak menanggapi dengan baik dan hanya memberi janji-janji, bahkan berusaha mengelak dari tanggung jawab, karena pada tanggal 3 Juli 2011, kuasa hukum penggugat telah menerima surat Nomor 001/CBM-VI/2011, perihal menanggapi surat dari bapak yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala macam pengurusan PT.CBM ditangani oleh Kusnadi Setio, yang sebelum surat ini diterima tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya mengenai permasalahan ini.

Adanya kopian surat tanda penerimaan barang bukti No.Pol.Sp.sita/06.a/III/ 2011/Dit Reskrimus tertanggal 19 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh AKP Salpandri selaku penyidik, jelas dan terang tergugat telah wanprestasi karena telah nyata dan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 28 ayat 32 perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, yang disebutkan bahwa “Pihak kedua (tergugat) menjamin bahwa alat yang disewa tidak digunakan untuk *illegal logging* dan/atau *illegal mining*”. Oleh karena itu penggugat telah dirugikan karena tidak lagi menerima pembayaran uang sewa alat berat dan penggugat tidak

¹⁵*Ibid.*

bisa menguasai kembali alat yang menjadi objek perjanjian, karena telah menjadi barang bukti perkara, dengan nilai alat berat sebesar Rp.2.504.526.840,- (dua milyar lima ratus empat juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).¹⁶

Oleh karena terjadinya permasalahan ini, maka penggugat telah melakukan pengurusan dari bulan Mei 2011 hingga gugatan ini diajukan yang telah menyebabkan penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi dan komunikasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Penggugat merupakan pengusaha yang dalam aktivitasnya banyak berhubungan dengan pihak perusahaan pembiayaan (leasing) yang sangat mengedepankan nama baik dan kepercayaan, sehingga dengan adanya masalah antara penggugat dan tergugat telah menyebabkan nama baik penggugat rusak, selain itu penggugat mengalami tekanan jiwa dikarenakan rusaknya keuangan penggugat yang tetap harus membayar cicilan alat berat yang menjadi objek perkara. Penggugat juga tidak bisa bekerja dengan maksimal akibat harus mengurus permasalahan ini, yang akibatnya penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila dinilai adalah berjumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

¹⁶*Ibid.*

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Meyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010 adalah sah dan mengikat bagi penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda tidak bergerak, yaitu kantor tergugat yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Sungai Rokan Nomor 28 B dan benda bergerak milik tergugat.

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa:

1. Menerima eksepsi dari tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).¹⁷

Sehubungan dengan putusan hakim di atas dapat dilihat bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankejikle verklaard/NO*). Oleh karena itu penulis ingin melihat lebih jauh tentang analisis yuridis, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat terhadap perkara tersebut.

¹⁷ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kata lain perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁸

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut: “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”¹⁹

Dari kedua definisi di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang kongkrit. Adanya perbedaan tersebut hanya terletak pada redaksi kalimat yang dipilih untuk mengutarakan maksud dan pengertiannya saja. Yang pasti yang menjadi perjanjian itu

¹⁸ Prof. R. Subekti S.H., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke-3 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001)

¹⁹ www.blogspot.com/2009/08/pengertian-dan-jenis-jenis-perjanjian.html?m=1, diakses pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 15:00

kemudian akan menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang atau kedua pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata dapat diketahui bahwa perikatan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber dari persetujuan (perjanjian);
2. Perikatan-perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Selanjutnya menurut Pasal 1352 KUH Perdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang yang timbul dari undang-undang akibat dari perbuatan orang;
2. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan si berhutang. Hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu hubungan hukum yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.²⁰

²⁰ www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html?m=1, diakses pada tanggal 1 Juli 2013, pukul 14:45

Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan asas terpenting, yaitu:²¹

1. Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnyanya perjanjian.
2. Asas Kebebasan Berkontrak, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi suatu perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

²¹ Prof. R. Subekti S.H., *Hukum Perjanjian*, cet ke-8, (Jakarta: PT. Intermassa, 2002), h. 18

3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian itu harus mengenai suatu objek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.²²

Pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.²³

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.17

²³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.1

Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁴

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH perdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya

²⁴ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.16

sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata tersebut.

B. Wanprestasi

Asas hukum terhadap suatu kontrak meliputi beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas kontrak sebagai hukum mengatur

Hukum mengatur (*aanvullen recht. Optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. Akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut.

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- a. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang.

- c. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
- d. Harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

3. Asas Pacta Sunt Servanda

Istilah “*pacta sunt servanda*” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

4. Asas Konsensual

Yang dimaksud dengan dengan asas konsensual dari suatu kontrak adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada perinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk jenis kontrak berikut ini:

- a. Kontrak perdamaian.

- b. Kontrak pertanggungan.
- c. Kontrak penghibahan.
- d. Kontrak jual beli tanah.

5. Asas Obligator

Asas obligator adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatanya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.²⁵

Menurut kamus umum bahasa Indonesia pengertian utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.²⁶

Pasal 1756 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang pengertian utang yang terjadi karena peminjaman uang, menyebutkan “utang yang terjadi peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian”.²⁷

Hutang-piutang adalah hutang kita kepada orang (lain), dan hutang orang (lain) kepada kita. Yang artinya adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan janji untuk membayar. Hutang piutang adalah wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang

²⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 11.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1995), h. 1139.

²⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga printing, 2007, h. 451.

lainnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang-piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian.²⁸

Sebagai perjanjian yang melahirkan perikatan dengan syarat tangguh, maka kewajiban dari penanggung dalam suatu penanggungan hutang baru ada pada saat syarat yang disebutkan terjadi. Syarat tersebut, sesuai dengan rumusan Pasal 1820 Kitab undang-undang hukum perdata, sebagaimana yang dikutip diatas adalah peristiwa wanprestasi dalam perikatan pokok yang dijamin atau ditanggung oleh penanggung tersebut. Untuk mengetahui kapan penanggung berkewajiban untuk melaksanakan perikatan, prestasi atau kewajibannya berdasarkan perjanjian penanggungan hutang, maka harus diketahui kapan wanprestasi itu dianggap telah terjadi.²⁹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁰

²⁸ [Http://Terkini-Indonesia.Blogspot.Com/2011/06/Hukum-Mengenai-Hutang-Piutang-Pribadi.Html](http://Terkini-Indonesia.Blogspot.Com/2011/06/Hukum-Mengenai-Hutang-Piutang-Pribadi.Html), tgl 15 April 2012.

²⁹ Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Penanggungan Hutang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, (Jakarta: PT. RajagGafindo Persada, 2002), h. 88.

³⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³¹

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³²

³¹ *Ibid*, h.74

³² A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26

Apabila debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perjanjian maka disebut cidera janji atau ingkar janji. Sebelum dinyatakan cidera janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi (*ingebrekestelling*) yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.³³

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1266 BW, yang menentukan bahwa tiap perjanjian selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan kepada hakim. Dalam hubungan ini telah dipersoalkan, apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak debitur ataukah harus dibatalkan oleh hakim.

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1982), h. 148.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami, bahwa pembatalan perjanjian harus melalui putusan hakim di sidang pengadilan. Oleh karena itu sebenarnya pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain, maka secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Terhadap Sengketa dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr

Pada tanggal 19 November 2010, PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (Penggugat) dan PT.Cahaya Bara Mulia (Tergugat) telah melakukan kesepakatan dan sekaligus penandatanganan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, tertanggal 19 November 2010. Dimana perjanjian tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun, yaitu hingga tanggal 18 November 2011 dengan objek sewa menyewa adalah 1 (satu) unit escavator merk Komatsu Hydroulic Axcavator, PC300SE-87 warna kuning.

Pada uraian di atas, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut sudah sah dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1320, yaitu:

1. Sepakat, bahwa antara PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi dengan PT. Cahaya Bara Mulia telah melakukan kesepakatan dan sekaligus penanda tanganan perjanjian sewa menyewa.

2. Kecakapan, bahwa PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi dan PT. Cahaya Bara Mulia sebagai salah satu badan hukum perdata yang dianggap sudah cakap melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Suatu hal tertentu, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disebutkan hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian, yaitu tentang sewa menyewa alat berat satu unit excavator merek Komatsu Hydraulic Axcavator, PC300SE-87 warna kuning selama 1 (satu) tahun.
4. Suatu sebab yang halal, bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perjanjian sewa menyewa tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perjanjian sewa menyewa juga telah diatur dalam undang-undang, yaitu pada Buku III, bab VII, Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata.

Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa pihak kedua (tergugat) menjamin sepenuhnya keamanan alat berat sewa yang disewa dari pihak pertama (penggugat) disimpan di tempat dan/atau garasi yang aman dan layak. Disamping itu, pihak kedua (tergugat) menjamin bahwa alat berat yang disewa tidak digunakan untuk *illegal logging* dan/atau *illegal mining*.

Sengketa berawal dari pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan tergugat pada saat perjanjian baru berlangsung selama tiga bulan, yaitu tanggal 18 Maret 2011 penggugat menerima kiriman faksimili dari tergugat berupa surat dengan

Nomor 002/CBM/III/2011, dengan perihal pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat tertanggal 18 Februari 2011.

Pengakhiran perjanjian secara umum diatur dalam undang-undang. Penentuan berakhirnya perjanjian sewa menyewa terkait dengan bentuk perjanjian. Ketentuan hukum perjanjian sewa menyewa dalam KUH Perdata membedakan antara perjanjian sewa menyewa yang dibuat secara lisan dan tertulis.

Perjanjian sewa menyewa tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi “*Jika sewa menyewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberitahuan untuk itu*”.³⁵

Sewa menyewa juga dapat berakhir dengan ketentuan khusus, yaitu:

1. Permohonan/ Pernyataan dari salah satu pihak

Penghentian perjanjian sewa menyewa hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Penghentian karena kehendak para pihak ini bisa dilakukan tanpa putusan dari pengadilan, diatur di dalam Pasal 1579 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pemilik barang tidak dapat menghentikan sewa dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan sendiri barangnya, kecuali apabila waktu membentuk perjanjian sewa menyewa ini diperbolehkan.

³⁵ Yahya Harahap S.H., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 240

2. Putusan Pengadilan

Penghentian hubungan sewa menyewa yang dikehendaki oleh salah satu pihak saja hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 49 Tahun 1963 jo PP Nomor 55 Tahun 1981.

3. Benda/objek sewa menyewa musnah

Pasal 1553 KUH Perdata mengatur apabila benda sewaan musnah sama sekali bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum. Dengan demikian perjanjian berakhir bukan karena kehendak para pihak, melainkan karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Dari uraian penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa adapun pengakhiran perjanjian yang diajukan oleh tergugat melalui surat yang dikirim kepada penggugat pada tanggal 18 Maret 2011 tersebut tidaklah sesuai dengan pengakhiran perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Maka dari itu terjadilah sengketa antara penggugat dan tergugat. Penggugat merasa keberatan dengan mengirim surat balasan kepada tergugat terkait pembatalan perjanjian tersebut. Pengakhiran perjanjian hanya terjadi apabila kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhirinya, meskipun tergugat telah mengajukan permohonan pengakhiran perjanjian secara tertulis kepada penggugat.

Para pihak yang bersengketa wajib membuktikan tentang duduk perkaranya, tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban mereka untuk membuktikannya

karena merupakan kewajiban hakim untuk mengetahui hukum, dan untuk menerapkan hukum tersebut sesudah ia mengetahui segala-galanya tentang hukum yang harus diterapkan itu.

Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan, bahwa *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*

Dalam tahap pembuktian kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang ada padanya, baik bukti tertulis, saksi dan sebagainya. Pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim agar apa yang diungkapkan di muka sidang menjadi jelas dan dapat diterima oleh majelis hakim.

Para pihak harus memberikan kepada hakim suatu kepastian yang masuk akal, bahwa apa yang diuraikan dalam fakta-fakta adalah selaras dengan kebenaran. Hakim yang satu menganggap pembuktian sudah diberikan, sedangkan hakim yang lain menganggap belum. Dalam hal demikian orang tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap hakim mesti memutuskan hal itu dengan kepastiannya sendiri. Tetapi ia tidak boleh berpegang kepada keyakinan hati nuraninya saja, dan tidak boleh meminta bukti yang sedemikian sempurnanya, sehingga tidak dapat digoyahkan sedikitpun, ia sebenarnya bergerak di antara dua kutub yang bertentangan.³⁶

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h.25

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan kata lain membuktikan juga diartikan sebagai suatu upaya untuk dapat meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil (dalil-dalil) atau posita yang dikemukakan dalam suatu perkara, yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara logis, mengapa dalil (dalil-dalil) tertentu dianggap benar.³⁷

Demikian juga halnya dengan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr, antara PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat) dengan PT.Cahaya Bara Mulia (tergugat), yang mana penggugat adalah perusahaan penyedia jasa sewa alat berat excavator yang disewa oleh tergugat. Namun dalam masa sewa tergugat tidak dapat melaksanakan sebagaimana yang telah diperjanjikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penyelesaian perkara tersebut.

Dalam gugatannya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, yakni tidak dapat melaksanakan hal-hal yang telah diperjanjikan. Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, bahwa tergugat tidak dapat menggunakan alat berat tersebut sebagaimana yang telah diperjanjikan, karena tergugat menggunakan alat berat tersebut untuk penambangan liar, sehingga diamankan oleh pihak berwajib. Disamping itu tergugat juga tidak melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana yang telah diperjanjikan.

³⁷ *Ibid*, h.26

Untuk menguatkan pernyataan yang disampaikan, maka penggugat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor: 001/KMSA/PKU/XI/2010 tanggal 19 November 2010.
2. Surat Nomor: 002/CBM/III/2011, tanggal 28 Februari 2011, perihal pengakhiran perjanjian sewa menyewa alat berat yang dikirim oleh PT. Cahaya Bara Mulia (tergugat) kepada PT. Up.Sapta Aprianta (penggugat).
3. Surat penerimaan barang bukti Nomor Pol: SP.Sita/06.a/III/2011/Dit Reskrimsus, tanggal 19 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Jambi.
4. Surat Nomor 001/CBM/IV/2011, tanggal 1 April 2011, perihal informasi alat berat, yang dikirim oleh PT. Cahaya Bara Mulia (tergugat) ditujukan kepada Irawan Harahap, SH (kuasa hukum penggugat).
5. Surat Nomor 001/CBM/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011, perihal menanggapi surat dari bapak, yang dikirim oleh PT. Cahaya Bara Mulia (Tergugat) ditujukan kepada Irawan Harahap, SH (kuasa hukum penggugat).
6. Surat pernyataan tanggal 26 Januari 2010 dari Kurnadi Setio tentang kedudukannya sebagai pemegang saham dan pengurus/jabatan Direktur PT. Cahaya Bara Mulia.

7. Laporan kerja alat berat jenis KOMATSU PC 300-8, masing-masing bulan Februari/Maret, Januari/Februari 2011, Desember/Januari 2011, serta Desember.
8. Invoice untuk bukti kepemilikan 1 (satu) unit Excavator seri Komatsu Hydrolic PC300PC-8, yang diterbitkan oleh PT. United Tractors Tbk.
9. Perjanjian sewa guna usaha dengan opsi No. 100.01030567.1/01.100.910.00. 101467.0, tanggal 29 November 2010.
10. Rincian perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor 100.01030567.1/01.100. 101467.0.
11. Surat Nomor 020/KMSA/VII/2011, tanggal 22 Juli 2011, perihal penundaan pembayaran angsuran, yang dikirim oleh PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat) ditujukan kepada PT. Astra Sedaya Finance Jakarta Selatan.
12. Surat Nomor 05/KMSA/VIII/Fleet/AR/2011, tanggal 16 Agustus 2011, perihal pemberitahuan, yang dikirim oleh PT. Astra Sedaya Finance ditujukan kepada PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (Penggugat).
13. Surat Nomor 11/KMSA/VIII/Fleet/AR/2011, tanggal 20 Agustus 2011, perihal teguran, dikirim oleh PT. Astra Sedaya Finance ditujukan kepada PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat).
14. Surat pernyataan dari Agusli (PT. Cahaya Bara Mulia), ditujukan kepada PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat).

15. Surat Nomor 14/KMSA/IX/Fleet/AR/2011, tanggal 19 September 2011, perihal peringatan, dikirim oleh PT. Astra Sedaya Finance ditujukan kepada PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat).
16. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor.C- 13771 HT.01.01. TH.2000, tanggal 12 Juli 2000, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi.
17. Akta Notaris Nomor 176 tanggal 24 Maret 2000 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas “Karunia Mandiri Sejahtera Abadi” (PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi”.
18. Akta Notaris Nomor 7 tanggal 29 Januari 2008, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi.³⁸

Semua bukti surat tersebut di atas diajukan oleh PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi selaku penggugat, yang telah dibubuhi materai cukup, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa dalil-dalil yang diungkapkan oleh penggugat adalah benar, dan sesuai dengan bukti yang diajukan.

Namun dalam kenyataannya dapat diketahui, bahwa banyaknya bukti belum tentu majelis hakim yakin tentang dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Bukti surat yang diajukan tersebut bukan berarti dapat diterima semua oleh majelis hakim, tentunya harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang lain, yakni bukti saksi sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dalam perkara di atas.

³⁸ *Opcit*

Sebagaimana saksi Bima Affiantono yang mengatakan, bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Astra, yang menjual alat-alat berat dan saksi mengenal Sapta Aprianta sebagai Direktur PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi., yang telah membeli 8 (delapan) unit excavator pada PT. Astra, perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pembelian excavator tersebut masih aktif hingga perkara ini sampai ke pengadilan.

Dari 8 (delapan) unit excavator tersebut ada 1 (satu) unit mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembelian excavator dengan merk Komatsu PC300SE-8. Keterlambatan pembayaran angsuran tersebut menurut Sapta Aprianta adalah karena ada masalah dengan pihak PT. Cahaya Bara Mulia, yakni pembayaran sewa alat berat tersebut yang belum dibayar. Adapun yang harus dibayarkan oleh penggugat sebagai angsuran alat berat tersebut adalah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya. Namun dengan keterlambatan tergugat dalam melakukan pembayaran sewa alat berat tersebut, maka penggugat juga terlambat dalam membayar angsurannya.

Selanjutnya saksi yang diajukan oleh penggugat adalah Syahrums, merupakan sahabat dari Sapta Afrianta Direktur PT. Karunia Mandiri Sejahtera, saksi kenal dengan Agusli Direktur PT. Cahaya Bara Mulia, sebagai hubungan bisnis di bidang perkebunan. Saksi yang mempertemukan antara Sapta Afrianta dengan Agusli pada Tahun 2010, pada waktu itu Agusli mengatakan pada saksi bahwa ia membutuhkan

alat berat jenis excavator merk Komatsu, lalu saksi menyuruh Agusli menemui pak Sapta Afrianta.³⁹

Kemudian terjadi perjanjian antara Sapta Afrianta Direktur PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi (penggugat) dengan Agusli Direktur PT. Cahaya Bara Mulia (tergugat), untuk sewa alat berat excavator merek Komatsu, dimana saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut.

Agusli menggunakan excavator tersebut untuk proyek pertambangan batubara yang terletak di Muara Jambi. Adapun perjanjian sewa penyewa alat berat tersebut dengan Surat Perjanjian Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, dan saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut.

Kemudian pembayaran sewa alat berat tersebut terlambat karena ada masalah dengan pertambangan batu bara yang merupakan bisnis dari tergugat, dengan demikian maka pembayaran uang sewa tersebut juga mengalami keterlambatan, karena perusahaan juga sedang melakukan pembenahan terhadap bisnis yang dilakukan oleh tergugat.

Untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat juga mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, tanggal 19 November 2010.

³⁹ *Ibid*

2. Bukti setoran uang melalui Bank Mandiri, tanggal 13 Desember 2010, penerima PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi, jumlah uang Rp.110. 750.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Bukti setoran uang melalui Bank Mandiri, tanggal 13 Desember 2010, penerima Mastari jumlah uang Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).
4. Surat penitipan barang, tanggal 9 September 2011, yang ditanda tangani oleh Syahrums dan Agusli.
5. Kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa sewa 1 (satu) unit excavator Komatsu PC300SE-8, periode 15 Desember 2010 sampai dengan 14 Januari 2011 dan invoice No.008/KMSA/11.
6. Kuitansi tanggal 18 Februari 2011 sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), untuk pembayaran jasa sewa periode tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 dan invoice No.015/KMSA/II/11.
7. Kuitansi tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa sewa periode tanggal 15 Februari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 dan invoice No. 026/KMSA/III/11.
8. Kuitansi tanggal 25 April 2011 sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Kuitansi tanggal 23 Mei 2011 sebesar Rp. 93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa sewa periode 15 April 2011 sampai dengan 14 Mei 2011 dan invoice No.048/KMSA/V/11.
10. Kuitansi tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran jasa sewa periode tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 dan invoice No. 049/KMSA/VI/11.⁴⁰

Di samping bukti surat, tergugat juga mengajukan saksi di persidangan, yakni sebagai berikut:

Saksi Hariyanti yang menerangkan, bahwa ia kenal dengan Agusli sebagai Direktur PT.Cahaya Bara Mulia sebagai atasannya karena ia bekerja di bagian administrasi di kantor tersebut, tetapi ia tidak kenal dengan Sapta Aprianta Direktur PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi.

Saksi mengetahui adanya perjanjian sewa alat berat antara Agusli dengan Sapta Aprianta, yang ditanda tangani oleh direktur. Saksi tidak pernah melihat secara fisik alat berat yang disewa tersebut. Saksi selaku pegawai administrasi pada PT.Cahaya Bara Mulia pernah mentransfer uang kepada PT. Karunia Sejahtera Abadi sebesar Rp.110.750.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank Mandiri. Selain itu saksi juga pernah mentransfer uang kepada PT.Karunia Mandiri Sejahtera Abadi ke rekening atas nama Mastari sebesar

⁴⁰ *Ibid*

Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), atas permintaan Direktur PT. Cahaya Bara Mulia.

Saksi juga pernah melakukan pembayaran uang sewa alat berat kepada PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi, dan pembayaran dilakukan setiap bulan melalui Bank Mandiri. Namun saksi tidak mengetahui apakah pembayaran uang sewa tersebut lancar atau tidak, dan semua bukti pembayaran uang sewa yang saksi lakukan semuanya ada bukti dan diketahui oleh saksi.

Selanjutnya saksi Masyudi yang menerangkan, bahwa saksi bekerja pada PT. Cahaya Bara Mulia yaitu pada bulan Desember 2010, yang ditugaskan untuk mencatat jam kerja alat berat sebanyak 3, yaitu Excavator Komatsu type PC 200, Komatsu type PC300 dan Komatsu Caberk.

Dalam satu hari alat berat bekerja selama 8 (delapan) jam, dan dalam satu bulan alat berat bekerja selama 300 jam, dan sewa alat berat tersebut setiap jam sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Perhitungan jam kerja alat berat dihitung berdasarkan laporan operator alat berat dan juga menggunakan data dari hasil pencatatan komputer yang ada pada alat berat tersebut.

Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama alat berat tersebut bekerja, pada saat saksi masuk bekerja pada PT. Cahaya Bara Mulia, alat berat tersebut sudah ada, dan saksi tidak mengetahui apa penyebab alat berat itu tidak digunakan lagi di lokasi

pertambangan. Penggunaan alat berat tersebut digunakan untuk lokasi pertambangan batubara di daerah jambi, dan saksi tidak mengetahui pemilik pertambangan tersebut.

Hukum pembuktian dimaksudkan sebagai suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan.⁴¹

Namun dalam perkara ini terlihat bahwa majelis hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat terlihat terlalu memaksakan gugatan tersebut, sedangkan tergugat dalam pembuktiannya masih menunjukkan iktikad baik dalam melakukan pembayaran uang sewa tersebut, dengan demikian maka mejelis hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat melalui pembuktiannya terlalu prematur dan kabur, dan yang disampaikan oleh penggugat ternyata tidak terbukti, karena tergugat dalam pembuktiannya menyebutkan bahwa apa yang dituduhkan penggugat tidak beralasan, sehingga apa yang disampaikan oleh tergugat dapat diterima oleh hakim, dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).

Majelis hakim sebenarnya telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan alat-alat bukti, yang bertujuan untuk mendukung dalil-dalil yang dikemukakannya, namun penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut ada ditangan majelis hakim.

⁴¹ R.Subketi, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), h. 2

Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr adalah sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; dan
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dari amar putusan di atas menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima antara lain sebagai berikut:⁴²

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 HIR jo. SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No.4 Tahun 1996 tentang Surat Kuasa.
2. Gugatan mengandung *error in persona*

Kemungkinan adanya cacat yang seperti itu bisa berbentuk *diskualifikasi in persona*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak memilih *persona stand in judicio*. Bisa juga pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis*

⁴² M. Yahya Harahap S.H., *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 888

aanhoedanigheid), atau yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan mengandung cacat formil *plorium litis consortium*. Dalam hal yang demikian, hakim harus menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Gugatan di luar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan. Apabila hakim berhadapan dengan kasus perkara yang secara absolut atau relatif berada di luar yuridiksinya, ia harus menjatuhkan putusan yang berisi amar:
 - a. Tidak berwenang mengadili; dan
 - b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
4. Gugatan *obscur libel*, yakni penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada Pasal 8 ke-3 Rv. Oleh karena itu, makna gugatan kabur sangat luas ruang lingkupnya, yaitu:
 - a. Dalil gugatan (*fundamentum petendi*), tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;
 - b. Tidak jelas objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas; dan
 - d. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata.
5. Gugatan masih prematur.
6. Gugatan telah daluwarsa (Pasal 1941 KUH Perdata).

B. Pertimbangan Majelis Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan secara hukum dan fakta yang ditemui di persidangan. Hal ini sangat penting dalam rangka memberikan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak.

Pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan tentunya harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kedua belah pihak di pengadilan. Semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan menjadi bahan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sehubungan dengan pemeriksaan perkara No.108/Pdt/G/2011/PN.Pbr antara PT. Karunia Mandiri Sejahtera Abadi dengan PT. Cahaya Bara Mulia dalam perkara sewa-menyewa alat berat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut PT. Cahaya Bara Mulia selaku tergugat mengajukan eksepsi, yang menyatakan gugatan penggugat premature dan kabur, sebab penggugat telah mengajukan gugatannya yang menyebutkan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena telah terbukti menggunakan alat berat milik penggugat di lokasi *illegal mining*.

Atas sangkaan tersebut tergugat menolaknya, sebab tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan penggugat. Di sini tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat prematur, artinya terlalu cepat dan pengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Dalam pokok perkara, bahwa tergugat tidak pernah diperlihatkan atau dijelaskan tentang isi dari perjanjian, terlebih mengenai istilah *illegal logging* dan *illegal mining*. Mengenai pengakhiran sewa alat berat dimungkinkan mengingat usaha yang sedang dilakukan oleh tergugat menurut kalkulasi perhitungan tergugat saat itu sudah tidak menguntungkan lagi, dan tergugat sudah memberitahukannya secara tertulis kepada penggugat.

Selanjutnya bahwa penggugat dalam rekonvensi juga telah menitipkan uang jaminan/deposito sebesar Rp.110.750.000,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atas permintaan tergugat dalam rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian sewa alat berat.

Penggugat dalam rekonvensi juga telah menitipkan uang tambahan sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) melalui Bank Mandiri atas nama Mastari.

Sehubungan dengan itu penggugat telah mengajukan replik, yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi dan menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Atas penolakan dari penggugat tersebut, tergugat juga telah mengajukan duplik atas replik penggugat, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil gugatan rekonvensi.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagaimana yang dijelaskan di atas. Demikian

juga halnya dengan tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat mempunyai usaha persewaan alat berat, pada tanggal 19 November 2010, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian sewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, objek perjanjian adalah 1 (satu) unit excavator PC300SE-87 warna kuning dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 18 November 2011.

Dalam perjanjian tersebut ada klausul yang menyatakan bahwa: “tergugat menjamin sepenuhnya keamanan alat berat yang disewa dari penggugat, disimpan di tempat dan atau garasi yang layak dan aman. Tergugat menjamin alat yang disewa tidak digunakan untuk *illegal logging* dan/atau *illegal mining*, dan tergugat mempunyai kewajiban membayar uang sewa sebesar Rp.93.750.000,- (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan”.

Pada saat perjanjian berjalan 3 (tiga) bulan, tergugat mengirim surat kepada penggugat yang menyatakan mengakhiri perjanjian sewa alat berat. Penggugat keberatan atas keinginan tergugat lalu mengirimkan surat balasan bahwa pengakhiran perjanjian sebelum waktunya dan mendadak bertentangan dengan hukum. Pada tanggal 22 Maret 2011, penggugat mendapat berita excavator yang disewa tergugat

telah disita oleh Kepolisian dan dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).

Kewajiban tergugat membayar uang sewa alat berat hanya lancar sampai dengan bulan Februari 2011, sedangkan pembayaran seterusnya tidak pernah ada hingga gugatan ini diajukan. Menurut penggugat, perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut merupakan perbuatan wanprestasi/ingkar janji. Penggugat telah meminta pertanggungjawaban tergugat atas perbuatannya tersebut melalui tahapan-tahapan, yakni mengirim surat permintaan informasi, selanjutnya somasi pertama dan somasi terakhir pada bulan Juni 2012, akan tetapi tidak ada tanggapan, sehingga penggugat menderita kerugian materil dan immateril.

Dari posita gugatan di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan, bahwa dalil perbuatan wanprestasi yang diduga dilakukan tergugat terhadap pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor: 001/KMSA/PKU/XI/2010 yakni:

1. Menggunakan alat berat (1 unit excavator) yang menjadi objek perjanjian untuk kegiatan penambangan tanpa izin/*illegal mining*.
2. Mengakhiri perjanjian sebelum waktunya tanpa alasan yang sah dan tidak membayar sewa alat berat setelah perjanjian sewa diakhiri pada bulan Februari 2011.

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan, bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat mengenai wanprestasi yang dinyatakan penggugat, bahwa

tergugat telah menggunakan alat berat yang disewa untuk penambangan liar, dimana materi eksepsi telah masuk dalam ranah pokok perkara, yang terlebih dahulu harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka eksepsi tergugat tersebut harus ditolak.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tergugat mengenai gugatan prematur, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana diterangkan di atas.

Majelis hakim membandingkan kebenaran antara fakta hasil kajian uraian gugatan dan jawaban tergugat, yaitu:

1. Penggugat telah menyewakan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tipe PC300SE-87 warna kuning kepada tergugat.
2. Penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian sewa menyewa alat berat Nomor 001/KMSA/PKU/XI/2010, tanggal 19 November 2010, perjanjian tersebut berakhir pada bulan November 2011.
3. Alat berat yang disewa tergugat dari penggugat telah disita oleh Kepolisian sehubungan dengan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin/*illegal mining*.

4. Tergugat pernah mengirimkan surat kepada penggugat tertanggal 18 Februari 2011 yang bermaksud mengakhiri perjanjian sewa alat berat.⁴³

Selanjutnya dalam pertimbangan majelis hakim juga menyatakan, bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan, untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.⁴⁴

Perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, dengan isi perjanjian mengenai suatu hal tertentu, yakni penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tambang batubara. Dalam hal ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya konsensus yang mengandung kekhilafan, paksaan atau penipuan, yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak untuk melaksanakannya.

⁴³ Berkas Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr

⁴⁴ R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1985), h.305

Perjanjian sewa menyewa alat berat yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat berlaku selama 1 (satu) tahun, dan berakhir pada tanggal 18 November 2011. Sebelum berakhir masa sewa alat berat tersebut, tergugat telah mengirim surat kepada penggugat untuk memberitahukan akan mengakhiri sewa alat berat tersebut dengan alasan adanya perubahan peraturan di areal tempat tergugat bekerja.

Selanjutnya ada 4 (empat) kriteria untuk menentukan adanya perbuatan wanprestasi/ingkar janji, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi perjanjian.
2. Terlambat memenuhi perjanjian.
3. Memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/sebagian.⁴⁵

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa tergugat belum dapat dikatakan wanprestasi, karena tergugat masih melakukan pembayaran angsuran sewa alat berat tersebut, dan tidak pernah dituduh melakukan penambahan liar, petugas kepolisian hanya menanyakan tentang usaha yang tergugat lakukan.

Dengan demikian majelis hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh tergugat, bahwa gugatan yang diajukan penggugat prematur dan konsekuensinya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard/NO*).

⁴⁵ *Ibid*, h.292

Sehingga putusan majelis hakim berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari tergugat.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Sehubungan dengan putusan tersebut di atas terlihat bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan, bahwa apa yang disampaikan oleh tergugat dinyatakan benar. Gugatan yang diajukan oleh penggugat terlalu cepat, dengan alasan bahwa gugatan diajukan pada saat perjanjian masih tetap berjalan. Kemudian tergugat juga masih melakukan pembayaran angsuran terhadap sewa alat berat tersebut.

Disamping itu, tergugat juga tidak pernah menggunakan alat berat tersebut untuk penambangan liar, apa yang dituduhkan oleh penggugat tidak terbukti, karena di lapangan pihak kepolisian hanya meminta keterangan kepada tergugat tentang penggunaan alat berat tersebut, dan ternyata tidak ada hubungannya dengan penambangan liar.

Sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan yang memenangkan tergugat, dengan pertimbangan bahwa penggugat dalam alasan-alasan gugatannya tidak mempunyai alasan yang dapat diterima. Sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Acara Perdata, bahwa majelis hakim harus mempertimbangkan setiap petitum (tuntutan)

yang diajukan oleh para pihak, tidak boleh ada satupun yang tertinggal, satu persatu dipertimbangkan secara seksama.⁴⁶

Sehubungan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlihat bahwa petitium yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sudah dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Acara perdata.

C. Upaya Hukum Bagi Penggugat dalam Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim.⁴⁷ Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang sedang berperkara di Pengadilan, baik itu penggugat maupun tergugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya.

Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan.⁴⁸

Untuk menghindari adanya keputusan pengadilan yang salah dan/atau tidak mencerminkan keadilan terhadap para pencari keadilan dalam penanganan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, maka undang-undang telah memberikan

⁴⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dan Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h.111

⁴⁷ Sarwono S.H., M.Hum., *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 350

⁴⁸ *Ibid*

kesempatan kepada pihak yang dikalahkan baik itu keputusan di pengadilan tingkat pertama maupun keputusan pengadilan tingkat akhir.

Terdapat beberapa jenis putusan negatif yang tidak melekat padanya unsur *ne bis in idem*, antara lain:

1. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*)

Misalnya terhadap penggugat eksepsi diskualifikasi *in persona* atau terdapat kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Dalam putusan itu tidak melekat *ne bis in idem*. Penggugat dapat atau berhak mengajukan gugatan kembali setelah kekeliruan itu diperbaiki.

2. Gugatan prematur

Gugatan yang menjadi prematur menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan yang demikian tidak melekat *ne bis in idem*. Gugatan dapat diajukan kembali apabila faktor prematur tidak ada lagi. Misalnya, dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasan. Sebelum waktu itu tiba, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam kasus tersebut, gugatan mengandung cacat prematur. Oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun dalam putusan itu tidak melekat *ne bis in idem*. Apabila jangka waktu yang ditentukan telah tiba, dan

debitur belum atau gagal memenuhi pembayaran, kreditur dapat mengajukan gugatan baru.⁴⁹

Upaya hukum dalam hukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa (*buitengewoon rechtsmiddel*). Upaya hukum biasa terdiri dari verstek, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum istimewa terdiri dari peninjauan kembali (*request civiel*) dan perlawanan pihak ketiga (*deden verzet* atau *verzet door derden*).

1. Upaya Hukum Biasa

a. *Verstek*

Verstek yaitu putusan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu (Pasal 129 HIR). Dalam putusan ini pihak tergugat yang berada pada pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada tergugat (Pasal 128 ayat (1) HIR jo. Pasal 152 ayat (1) RBg).

b. Banding

Pengajuan banding ini merupakan salah satu upaya hukum terhadap suatu putusan hakim di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Dengan diadukannya banding oleh pihak yang dikalahkan ke pengadilan

⁴⁹ M. Yahya Harahap S.H., *Opcit*, h. 444

tinggi, maka perkara menjadi mentah kembali dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pelaksanaan dari putusan hakim belum dapat dilaksanakan oleh pengadilan, karena ada upaya hukum lain berupa banding.

Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi diatur dalam Pasal 188 sampai dengan Pasal 194 HIR untuk daerah Jawa dan Madura, serta Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg untuk daerah luar pulau Jawa dan Madura.

c. Kasasi

Permohonan Kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, kecuali dalam keputusan peradilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

2. Upaya Hukum Istimewa

a. Peninjauan Kembali (*Request Civiel*)

Peninjauan Kembali atau *request civiel* tidak diatur dalam HIR maupun RBg, tetapi dalam Rv, yaitu pada Pasal 385 sampai dengan Pasal 401.

Permohonan pengajuan peninjauan kembali oleh pemohon diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan.

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali atau *request civiel* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh pihak yang dikalahkan dalam persidangan 1 (satu) kali saja dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain atau peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali, sehingga keputusannya telah *in kracht van gewijsde*.

b. *Deden Verzet* atau *Verzet Door Derden*

Deden Verzet atau *Verzet Door Derden* atau yang biasa disebut dengan perlawanan pihak ketiga diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) RBg, dan Pasal 378 sampai dengan Pasal 382 Rv. *Deden Verzet* atau *Verzet Door Derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang merugikan pihak ketiga.

Namun dalam perkara *niet ontvankelijke verklaard/NO* seperti yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr tidak dapat diajukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum istimewa.

Pada Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr ditegaskan bahwa gugatan penggugat dengan materi pokok wanprestasi adalah prematur, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Gugatan yang diajukan prematur menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan negatif dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam putusan yang demikian tidak melekat *ne bis in idem*. Gugatan dapat diajukan kembali apabila faktor prematur tidak ada lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Amar putusan pada Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN.Pbr menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum : menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*).
2. Dalam pertimbangannya majelis hakim tidak menemukan bukti yang konkrit terhadap dalil yang dikemukakan oleh penggugat, bahwa tergugat telah menggunakan alat berat tersebut untuk penambangan liar, sehingga alat berat tersebut ditahan oleh pihak kepolisian, kemudian tergugat juga tidak membayar sewa alat berat tersebut sebagaimana yang diperjanjikan, namun dalam pertimbangannya hakim menyatakan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*).
3. Putusan Perkara Nomor 108/Pdt/G/2011/PN/Pbr yang menegaskan bahwa gugatan penggugat dengan materi pokok wanprestasi adalah prematur yang

berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Maka upaya hukum yang dapat dilakukan penggugat adalah dengan mengajukan gugatan baru. Pengajuan gugatan baru tersebut tidaklah melekat unsur *ne bis in idem*, dengan ketentuan faktor prematur tidak ada lagi dalam gugatan baru tersebut.

B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, tentunya majelis hakim harus benar-benar dapat menilai dan memutuskan menurut ketentuan hukum dan asas keadilan yang nyata dan dapat diterima oleh semua pihak. Bukan putusan yang berdasarkan kepada hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Bagi pihak yang berperkara, hendaknya sebelum sampai ke pengadilan diupayakan untuk melakukan perdamaian, karena perdamaian adalah jalan penyelesaian yang terbaik, sehingga dikemudian hari hubungan baik tersebut dapat terjaga sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Harahap, M. Yahya, S.H., *Hukum Acara Perdata tantang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Harahap Yahya S,H., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Badung, 2002
- Riduan, *Metode dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Bina Cipta, Bandung, 2004
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006